

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAHAN KOTA PADANG

(Studi Kantor Balai Kota Padang)

Arif Maulana<sup>1)</sup>, Popi Fauziati<sup>2)</sup>.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta

Email: [rifmaulana01@gmail.com](mailto:rifmaulana01@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja. Populasi dalam Penelitian ini yaitu Kantor Balai Kota Padang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penyebaran kuesioner pada Kantor Balai Kota Padang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja berpengaruh terhadap tingkat korupsi di wilayah Kota Padang. Sedangkan Peran Auditor Internal dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap tingkat Korupsi.

**Kata kunci :** *Peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja, Tingkat Korupsi*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Dampak tindak pidana korupsi yang terjadi disegala lini bidang pemerintahan sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017 terhadap pelaku usaha 11 Kota di Indonesia diantaranya Kota Padang, Jakarta, Pekanbaru, Balikpapan, Manado, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Dari semua kota tersebut Medan memuncaki posisi teratas dalam Kota terkorup di Indonesia dengan angka ipk 63,1 disusul dengan Makassar 53,4, dan nilai Ipk ada Kota Jakarta Utara dengan Ipk 73,9, Sementara itu Kota Padang sendiri berada di posisi ke 5 dengan Ipk 63,1, (Jika Nilai IPK semakin mendekati 0 maka suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya jika IPK mendekati 100 maka negara tersebut bersih dari korupsi). Dari semua data diatas menunjukkan bahwa

tingkat korupsi masih sangat memprihatinkan terutama di Kota Padang, disinilah peran Auditor Internal sangat penting dalam pemberantasan Korupsi di Kota Padang.

Sementara berdasarkan hasil-hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2017. Kota Padang berada di peringkat ke 10 dengan nilai 70.64, sedangkan pada Provinsi Sumbar sendiri berada pada peringkat ke 13 dengan nilai 68.51. Sementara berdasarkan hasil survei tersebut, Kota Banda Aceh mendapatkan indeks integritas tertinggi dan Kabupaten Papua mendapatkan nilai terendah. Jika dihubungkan dengan audit internal dengan kondisi di atas jelas audit internal belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai audit internal, artinya Kota Padang belum bersih dari korupsi. Oleh karena itu Peran audit sangat berpengaruh dalam pemberantasan Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Pengaruh peran auditor internal terhadap tingkat korupsi.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi
3. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap tingkat korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja.

Proses audit baik internal maupun eksternal berperan penting dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di pemerintah selaku penyelenggara negara (Kaufman et al. 2006 dalam [1]Masyitoh et al., 2015). Liu dan Lin (2012) menyatakan bahwa audit oleh badan audit pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, hasil audit atas laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku korupsi di tingkat pemerintah lokal (Liu & Lin, 2012).

Dalam penelitian tentang sistem pengendalian internal yang diteliti oleh Syarif (2016) dan Sari & Prabowo (2019) menyatakan bahwa SPI berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan. Ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian Setyawan et al. (2019) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap tingkat kecurangan. Penelitian yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal pemerintah ini masih menunjukkan hasil yang berbeda sehingga penelitian sebelumnya masih menimbulkan *research gap*.

Kurniawan (2009) dalam Yuliyana & [2]Setyaningrum (2016) menyebutkan pentingnya akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di Pemerintahan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhtar et al. (2018) membuktikan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap kerugian negara akibat korupsi. Penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian Yuliyana & [2]yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah yang menunjukkan pengaruh yang negatif.

## METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Balai Kota Padang yang berada di Kota Padang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022. Pengambilan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:80) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada Auditor yang bekerja pada Kantor Balai Kota Padang di Kota Padang. Menurut Sugiyono (2014:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Dalam penelitian ini, pengiriman kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengembalian (*response rate*) kuesioner bisa lebih tinggi.

Dalam melakukan pengujian statistik, maka penulis melakukan pengujian validitas dan realibilitas untuk membuktikan tingkat kevalidan dan keakuratan data yang diharapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan tahapan pengujian.

### 1. Uji Kualitas Data

- Uji Validitas Data

Dalam model Penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan data *reduction* melalui model varimax. Walaupun masih ada beberapa model yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian validitas seperti *corelation product moment*, *corelation intem delate*, model varimax dianggap lebih memberikan tingkat akurasi yang lebih baik dari dua model lainnya.

Didalam menguji validitas dengan menggunakan metode varimax, variabel yang diuji harus memenuhi kriteria yaitu harus memiliki nilai Kaiser Meyer Olikin (KMO) yang harus memiliki nilai

$\text{sig} \geq 0,05$ , setelah syarat tersebut terpenuhi maka validnya item pertanyaan ditentukan oleh rotasi matrik, dalam hal ini validnya masing-masing item ditentukan dari *factor loading*  $\geq 0,40$ , Jika seluruh item pertanyaan memenuhi syarat maka tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat dilaksanakan (Ghozali, 2016).

- Uji Reliabilitas

Uji realibitas digunakan untuk menghibur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji realibitas dalam Penelitian ini menggunakan *cronbach Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh (Ghozali, 2016), yaitu jika koefisien *Cronbach Alpha*  $> 0,7$  maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, Jika Koefisien *cronbach Alpha*  $\leq 0,7$  maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

## 2. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai diatas 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, Sebaliknya apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai dibawah 0,05 maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

- Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$  (Ghozali, 2016).

## 3. Pengujian Hipotesis

- Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi(  $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan alterasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ialah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menarangkan alterasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir segala informasi yang dibutuhkan buat memprediksi alterasi variabel depenen (Ghozali, 2013).

- Uji Statistik F

Menurut Ghozali, (2016), uji statistik F bertujuan buat mengenali apakah seluruh variabel leluasa (independen) yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel terikat (dependen). Uji statistik F bisa dicoba dengan memandang nilai signifikan ialah:

a.  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima ialah apabila nilai signifikan kurang dari serta sama dengan tingkatan signifikan( $\alpha= 0, 05$ ) berarti variabel indepeden secara serentak serta signifikan mempengaruhi terhadap variabel dependen.

b. Diterima,  $H_a$  ditolak ialah apabila nilai signifikan lebih dari tingkatan signifikan( $\alpha= 0, 05$ ) berarti variabel indepeden secara serentak serta signifikan tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen.

- Uji Statistik t

Menurut Ghozali, (2016), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauhnya pengaruh satu variasi independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Data penelitian yang telah diolah dianalisis dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Jika  $t \text{ sig} > 0,05$  maka  $H_0$  –diterima,  $H_a$  ditolak berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial.

b. Jika  $t \text{ sig} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Pengambilan Sampel

Tabel 1.1 Prosedur Pengambilan sampel

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebarakan	50	50
2	Jumlah Kuesioner yang tidak dikembalikan	(8)	(8)
3	Jumlah Kuesioner yang berhasil dikumpulkan	42	42
4	Jumlah Kuesioner yang rusak/tidak lengkap	0	0

5	Jumlah Kuesioner yang diolah	42	42
---	------------------------------	----	----

Pada tabel 1.1 teridentifikasi total jumlah kuesioner yang disebarakan berjumlah 50 lembar, setelah dilakukan pengumpulan kembali sebanyak 42 lembar kuesioner yang berhasil dikumpulkan. Setiap kuesioner yang berhasil dikumpulkan dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa masing-masing kuesioner yang berhasil dikumpulkan tidak mengalami kerusakan atau lengkap dalam pengisian. Total kuesioner yang digunakan dan diolah kedalam tahapan pengolahan data berjumlah 42 lembar atau mencapai 42% dari total kuesioner yang disebarakan.

## 2. Demografi responden

Tabel 1.2 Ringkasan demografi responden

Demografi	Jumlah	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	19	45.2
Perempuan	23	54.8
<b>Jenjang Pendidikan</b>		
D3	6	14.3
S1	19	45.2
S2	12	28.6
S3	5	11.9
<b>Jurusan Pendidikan</b>		
Akuntansi	24	57.1
Non Akuntansi	18	42.9
<b>Lama Bekerja</b>		
0-2 Tahun	5	11.9
3-5 Tahun	24	57.1
>6 Tahun	13	31
<b>Mengikuti Program Seminar</b>		
0-2	7	16.7
3-6	23	58.4
7-10	8	19
11-15	2	4

>16	2	4
-----	---	---

Pada tabel diatas diketahui sebagian besar responden berjenis kelamin wanita yaitu berjumlah 23 orang responden, sedangkan sisanya adalah responden berjenis kelamin pria yaitu berjumlah 19 orang responden.

Jika diamati dari tingkatan jenjang pendidikan sebagian besar responden berpendidikan D3 sebanyak 6 orang, sarjana (S1) yaitu berjumlah 19 orang, S2 berjumlah 12 orang dan S3 berjumlah 5 orang.

Berdasarkan demografis responden juga teridentifikasi bahwa sebagian besar responden yang mempunyai Jurusan Pendidikan Akuntansi yaitu sebanyak 24 orang responden. Non Akuntansi 18 orang responden.

Diamati dari lama bekerja sebagian besar responden yang bekerja diantara 0-2 tahun berjumlah 5 orang, yang bekerja diantara 3-5 tahun berjumlah 24 orang, sedangkan responden yang bekerja 6 tahun lebih berjumlah 13 orang.

Berdasarkan demografis responden juga teridentifikasi bahwa yang mengikuti Program seminar sebanyak 0-2 kali berjumlah 7 orang, yang mengikuti sebanyak 3 sampai 6 kali berjumlah 23 orang, yang mengikuti 7 sampai 10 kali berjumlah 8 orang, yang mengikuti 11 sampai 15 kali berjumlah 2 orang, yang mengikuti lebih dari 15 kali berjumlah 2 orang.

## 3. Hasil Pengujian Instrumen Data

- Hasil Pengujian Validitas

Tabel 1.3 Hasil Pengujian validitas

Variabel Penelitian	KMO	Factor Loading	Kesimpulan
Peran Audit Internal	0.716	0,531 0,872	- Valid
Sistem Pengendalian Internal	0,742	0,720- 0,868	Valid
Akuntabilitas Kinerja	0.735	0,666 0,884	- Valid
Tingkat Korupsi	0.730	0,652 0,871	- Valid

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan actor loading telah

memenuhi cut off yang ditentukan sehingga dapat disimpulkan bawa data penelitian valid.

- Hasil Pengujian realibilitas

Tabel 1.4 Hasil Pengujian realibilitas

Variabel Penelitian	Cronbach alpha	Cut off	Kesimpulan
Peran Audit Internal	0.908	0,90	Reliable
Sistem Pengendalian Internal	0,940	0,90	Reliable
Akuntabilitas Kinerja	0.924	0,90	Reliable
Tingkat Korupsi	0.940	0,90	Reliable

Pada tabel diatas terlihat bahwa masing-masing variabel penelitian telah memiliki *Cronbach Alpha* diatas 0,90 oleh sebab itu seluruh variabel penelitian yang terdiri dari Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Korupsi telah didukung oleh item pernyataan yang reliabel atau handal, sehingga dapat terus digunakan kedalam tahapan pengolahan data lebih lanjut.

#### 4. Hasil Pengujian Normalitas

Tabel 1.5 Hasil Pengujian Normalitas

Variabel Penelitian	Asymp (2-Tailed)	Sig Alpha	Kesimpulan
Peran Audit Internal	0.086	0,05	Normal
Sistem Pengendalian Internal	0,219	0,05	Normal
Akuntabilitas Kinerja	0.005	0,05	Tidak normal
Tingkat Korupsi	0.005	0,05	Tidak normal

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian yang terdiri dari Sisem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Kinerja belum berdistribusi normal, karena belum memenuhi syarat dengan nilai *asympt sig (2-tailed)* > 0,05. Berdasarkan kondisi tersebut maka upaya yang dilakukan untuk melihat normalitas data dengan mengLNkan data yang tidak normal tersebut. Hasil pengujian normalitas terlihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 1.6 Hasil Uji Normalitas setelah di LN

Variabel Penelitian	Asymp (2-Tailed)	Sig Alpha	Kesimpulan
Peran Audit Internal	0.086	0,05	Normal
Sistem Pengendalian Internal	0,219	0,05	Normal
Akuntabilitas Kinerja	0.056	0,05	Normal
Tingkat Korupsi	0.073	0,05	Normal

#### 5. Hasil Pengujian Multikolonieritas

Tabel 1.7 Hasil Pengujian Multikolonieritas

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Peran Audit Internal	0,719	1,391	Tidak Terjadi
Sistem Pengendalian Internal	0,687	1,457	Tidak Terjadi
Akuntabilitas Kinerja	0,820	1,220	Tidak Terjadi

Pada tabel diatas terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan telah memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 sedangkan nilai *Variance Influence Factor (VIF)* berada dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan didalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolonieritas, sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat segera dilaksanakan.

#### 6. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 1.8 Hasil Uji Hipotesis

Variabel Penelitian	B	Std Error	sig	alpha	kesimpulan
Peran Audit Internal	0,145	0,179	0,423	0,05	H <sub>1</sub> Ditolak
Sistem Pengendalian Internal	0,267	0,142	0,092	0,05	H <sub>2</sub> Ditolak
Akuntabilitas Kinerja	0,512	0,158	0,004	0,05	H <sub>3</sub> Diterima

Berdasarkan nilai yang terdapat dalam tabel diatas menunjukkan bahwa diperoleh keofisien determinasi sebesar 0,411. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di kota padang sebesar 41,1,% memberikan informasi terhadap tingkat korupsi, sedangkan sisanya 58,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Hasil yang diperoleh pada tahapan pengujian juga menimbulkan nilai F-signifikan sebesar 0,000. Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Korupsi, karena nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ , sehingga dapat disimpulkan dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran audit internal tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
2. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
3. Akuntabilitas kinerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

### 2. Saran

Sesuai dengan keterbatasan penelitian maka diajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penelitian dimasa mendatang disarankan untuk menggunakan sampel yaitu karyawan yang bekerja di Kantor Balai Kota Padang. Saran tersebut sangat penting untuk mendorong meningkatnya ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang akan diperoleh dimasa mendatang.

2. Peneliti dimasa mendatang disarankan untuk menambah variabel baru yang belum digunakan didalam penelitian ini. Saran tersebut sangat penting untuk mendorong meningkatnya ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang akan diperoleh dimasa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. D. Masyitoh, R. Wardhani, and D. Setyanigrum, "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010," *Semin. Nas. Akunt. 18 Univ. Sumatera Utara Medan*, no. September, pp. 1–26, 2015.
- [2] D. Setyaningrum, "Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi Kementerian/Lembaga The Effect of Audit Findings and Follow up of Audit Recommendation on Corruption of Ministries / Institutions in Indonesia View project Election on Discretionary Spending in Indonesia View project," 2016. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/332186316>.
- [3] E. Rahmadanti, "Auditor Eksternal dan Internal Sebagai Determinan Korupsi di Pemerintahan Daerah," *Fak. Ekon. Univ. Negeri Semarang*, pp. 1–125, 2020, [Online]. Available: <http://lib.unnes.ac.id>.
- [4] T. Rustendi, "PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMERANGI KORUPSI (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP)."
- [5] I. Brusca, F. Manes Rossi, and N. Aversano, "Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis," *J. Comp. Policy Anal. Res. Pract.*, vol. 20, no. 5, pp. 486–504, Oct. 2018, doi: 10.1080/13876988.2017.1393951.

## Jurnal

1. *Accounting Investigation*. Jhon Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey. Groff, Maja Zaman, and Roberto Di Pietra, and Aleša Saša Sitar. 2016. *Contemporary Role of Internal Auditing in Corporate Governance*. Dynamic Relationships Management Journal Vol 5 No 1 hal 51 – 63.
2. Albrecht, W. S., Albrecht, C., & Albrecht, C. C. (2008). Current Trends in Fraud and Its Detection. *Information Security Journal*, 17(1), 2–12. <https://doi.org/10.1080/19393550801934331>.

3. Albrecht, W. S. (2014). Iconic Fraud Triangle endures: Metaphor Diagram Helps Everybody Understand Fraud. *Fraud Magazine*, July/August, 1–7.
4. Transparency International. (2020). *What is corruption? - Transparency International*. Korupsi dan Integritas Politik (pp. 1–12).
5. Wahyuni, N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP)
6. Warkini, Bawono, I.R, Restianto, Y. E. 2020. *Akuntabilitas dan Transparansi LKPD Berpengaruh terhadap kasus korupsi: benarkah?.* *Akuntansi Dewantara*. Vol 4 (2). 113-127.
7. Rustendi, T.(2017). *PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMERANGI KORUPSI (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP)*. *Jurnal Akuntansi* Vol 12 (2),111-126.

### Buku

ACFE Indonesia Chapter. (2018). *Survai Fraud Indonesia 2016*. ACFE Indonesia Chapter.

AICPA, SAS No. 99, 2002, *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, AICPA, New York.

Bastian, I. (2016). *Audit Sektor Publik* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing, 2017, The Institute of Internal Auditors, Amerika Utara.

Pickett, Spencer KH. 2005. *The Essential Handbook of Internal Auditing*. Jhon Wiley & Sons Ltd., West Sussex – UK.

The Institute of Internal Auditor – The IIA. 2016. *International Standards for Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*. The Institute of Internal Auditors. Standards and Guidance, Florida.

Tim SPORA KPK. (2015). *Kapita Selekt dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

World Bank. 2016. *Fraud and Corruption Awareness Handbook, How It Work And What to Look-for : A Handbook for Staff*. Integrity Vice Presidency – The World Bank Group.

Zachrie, W. R (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Prosiding seminar/konferensi:

Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010*. Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, 1–26.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. (2008).

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2014).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. (2014).

PerMenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2015).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004).

### Skripsi/Tesis/Disertasi:

E. Rahmadanti, “Auditor Eksternal dan Internal Sebagai Determinan Korupsi di Pemerintahan Daerah,” *Fak. Ekon. Univ. Negeri Semarang*, pp. 1–125, 2020, [Online]. Available: <http://lib.unnes.ac.id>.